

PEREMPUAN DALAM STRUKTUR SOSIAL DAN KULTUR HUKUM BUGIS MAKASSAR

Abdillah Mustari

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
abdillahmustari_gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam struktur sosial masyarakat Bugis Makassar, memberi gambaran kondisi perempuan dalam kultur hukum Bugis Makassar dan menelusuri nilai-nilai Lontarak pa'pasang terimplementasikan dalam masyarakat Bugis Makassar. Rumusan tentang hak-hak asasi manusia dapat ditemukan pada sejumlah piagam dan naskah. Keragaman rumusan itu mencerminkan bahwa hak-hak asasi manusia merupakan nilai yang dijunjung tinggi sekaligus mencerminkan bahwa pandangan masyarakat tertentu tentang hak-hak itu mengalami perkembangan. Tetapi, banyaknya perhatian yang dicurahkan terhadap masalah hak-hak asasi manusia ternyata tidak mengurangi kasus-kasus pelanggaran yang ada, bahkan cenderung kian meningkat, termasuk dalam hal ini pelanggaran karena motivasi perbedaan jenis kelamin, khususnya terhadap perempuan. Perhatian akan hak-hak asasi manusia pun tidak lepas dari perhatian masyarakat Bugis Makassar yang diwariskan pada tiap generasi secara turun temurun melalui Lontarak. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran tentang atau keadaan yang sebenarnya tentang posisi perempuan dalam struktur sosial dan kultur hukum Bugis Makassar dalam naskah Lontarak. Status sosial perempuan Bugis tampaknya cukup tinggi. Hal itu dapat kita lihat baik dalam realitas sosial maupun dalam naskah kuno. Dalam naskah kuno perempuan Bugis disebut berani "mtEru" (materru) dan bijaksana "mlep nwnw" (malampé nawa nawa). Walau begitu, tugas utama dari seorang perempuan Bugis Makassar adalah menjadi seorang ibu yang salehah, baik dan tulus "mCji aido an tEto riedeceG tud ripcieG" (mancaji Indo ana tettong ridécénggé, tudang ripacingngé), menjadi penuntun suami yang jujur, hemat dan bijaksana sekaligus mitra pendukung dan penopang dalam mengatasi segala kesulitan maupun perjuangan dalam mengatasi segala hal.

Kata kunci : *Kesataraan, Lontarak pa'pasang*

WOMEN IN SOCIAL AND CULTURAL STRUCTURE OF BUGIS MAKASSAR LAW

Abdillah Mustari

Faculty Syariah and Law UIN Alauddin Makassar
abdillahmustari_gmail.com

Abstract

This research aims to understand position of women in social structure of Bugis Makassar Society. It will describe women condition on culture of Bugis Makassar law and observe the values of Lontarak pa'pasang which implemented in Bugis Makassar society.

The formulation of the human rights can be found in many charter and text, diversity in the formulation will reflect that the human rights are the values respected and reflecting that certain society perspective about rights improve. But, much attention is devoted to the problem of human rights in fact it cannot diminish the violation cases, moreover it more increases, including the violation motivated by different sex, especially women. Furthermore, the human right also is discussed by the Bugis Makassar society which inherits for generations through Lontarak.

This research is descriptive qualitative research which means to describe the real situation about the position of women in social and cultural structure of law Bugis Makassar in the text of Lontarak.

Social status of Bugis women appears high enough. It can be seen either in social reality or old manuscript. In the old manuscript, Bugis women are called brave "mtEru" (materru') and wise "mlep nwnw" (malampé' nawa nawa). However, the main duty of Bugis Makassar women is to be a godly mother, kind, and sincere "mCji aido an tEto riedeceG tud ripcieG" (mancaji Indo ana tettong ridécéngngé, tudang ripacingngé). Then guide of husband who is honest, economical, and wise and supporting partner and abutment to solve all difficulties and struggle to overcome everything.

Key Words: Equality, Lontarak pa'pasang

PENDAHULUAN

Rumusan tentang hak-hak asasi manusia dapat ditemukan pada sejumlah piagam dan naskah.¹ Keragaman rumusan itu mencerminkan bahwa hak-hak asasi manusia merupakan nilai yang dijunjung tinggi sekaligus mencerminkan bahwa pandangan masyarakat tertentu tentang hak-hak itu mengalami perkembangan. Tetapi, banyaknya perhatian yang dicurahkan terhadap masalah hak-hak asasi manusia ternyata tidak mengurangi kasus-kasus pelanggaran yang ada, bahkan cenderung kian meningkat, termasuk dalam hal ini pelanggaran karena motivasi perbedaan jenis kelamin, khususnya terhadap perempuan.

Masalah perempuan merupakan masalah yang begitu pelik dan kompleks. Berbagai artikel memperbincangkan perempuan, belum lagi forum-forum diskusi sudah banyak dilakukan. Namun demikian, perempuan dan keperempuanan selalu menjadi topik yang selalu hangat dan tetap banyak digemari. Sebetulnya, siapakah “perempuan”? bagaimana keberadaannya? bukankah substansi perempuan dimulai sejak munculnya kehidupan manusia? Sebagaimana Tuhan menciptakan lelaki, maka Dia pun menciptakan perempuan sebagai pasangan hidupnya. Keterhinaan-kemuliaan, ketertindasan-kemerdekaan dan ketersiksaan-keamanan merupakan rangkaian cerita dalam sejarah hidup perempuan, termasuk perempuan Bugis Makassar.

Transisi masyarakat Bugis dari era tradisionan ke modern sebenarnya melewati proses panjang dan kompleks. Banyak unsur kebudayaan warisan masa lalu yang masih tetap hidup. Ada pula yang perlahan-lahan mengalami proses transformasi yang lambat. Sejak abad sebelumnya lalu menjelma menjadi sesuatu yang baru, meskipun tetap ada jejak kesinambungannya dengan masa silam dan kini menjadi bagian dari kebudayaan Bugis modern. Namun, ada pula unsur-unsur budaya zaman lampau yang sudah lenyap sama sekali. Selanjutnya, objek-objek, norma-norma, dan pola-pola perilaku yang sama sekali baru telah dan masih terus muncul menggantikannya. Sebagian besar di antaranya tidak lagi berkaitan dengan ciri khas orang Bugis Makassar dan hanya merupakan pengaruh dari suatu budaya dunia dalam wujud ke-Sulawesi-selatan-an, dan ke-indonesia-an.. Benang-benang budaya aneka warna tersebut kemudian tersulam menjadi layar panca warna yang melatar belakangi budaya masyarakat Bugis Makassar dewasa ini.²

Suku Bugis Makassar di kenal sebagai salah satu suku di nusantara yang memiliki watak cenderung merantau.karena adanya kepercayaan mitos; contoh masyarakat Bugis, terpengaruh dengan adanya antara lain sugesti bahwa orang Bugis telah di takdirkan oleh Dewata Seuae (Tuhan yang Maha Esa) untuk menjadi

¹Lihat misalnya, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948; *Eroupean Convention of Human Rights*, 1950; *American Convention of Human Rights*, 1969; *Universal Islamic Decleracion of Human Rights*, 1981; dan *African Charter on Human and People's Rights*, 1981. Selanjutnya lihat Jam±l al-D³n Mu¥ammad Ma¥m- d,*Al-Isl±m wa al-Musykil±t al-Siy±siyyah al-Mu'±jarah*, (Cairo: Dr al-Kit±b al-Misr, 1413 H), Cet .ke-1, h. 225

² Christian Pelras,2006. *Manusia Bugis*.Jakarta: Nalar-Paris EFEO, h.175

kaya. Mereka yang mempunyai “ilmu”, yang di sebut *wawang asogireng* (ilmu untuk menguasai harta kekayaan). Mitos menyatakan, bahwa nasib mereka akan menjadi baik bila telah meninggalkan kampung halaman. Orang-orang tua akan menasehatkan kepada anak-anaknya untuk berani melakukan hal itu dengan melontarkan kata-kata :”*Iapa muiita deceng narekko musalai tana’e*’ (nanti baru dapat kebaikan kalau engkau tinggalkan kampung halaman’). Nasehat tersebut bersumber dari makna kata-kata : “*Mappesona ri Dewata seuae, tasalaipi kappotta taita deceng*” (Berserahlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tinggalkan kampungmu untuk nantinya memperoleh kebaikan).

Manifestasi semisal ungkapan di atas kemudian melahirkan motivasi ulet dalam bekerja, merantau yang tidak mengecualikan para perempuan Bugis Makassar. Ataupun ungkapan di atas harus dipahami dengan menguhubungkannya dengan ungkapan-ungkapan lain seperti *Mappasitinaja* yang berarti pantas, wajar atau patut. Artinya keuletan dalam rantauan harus meperhitungkan kepatutan dan kewajaran. Keabsahan perempuan merantau dan menjadi tenaga kerja pada dasarnya telah terlibat dalam masyarakat pedesaan, perempuan sebagai mitra kerja di ladang dan di sawah kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan yang menuntut keterlibatan perempuan dalam bidang-bidang yang tidak terbatas pada persoalan pengolahan pertanian saja.³ Akan tetapi, banyak ketidakadilan yang terjadi berlangsung di tempat kerja, khususnya pemenuhan hak-hak perempuan, baik hubungan antara buruh dan majikan serta hubungan buruh dengan perusahaan yang tidak harmoni. Bentuk ketidakadilan yang paling nyata adalah upah rendah yang biasanya dibenarkan dengan banyak alasan seperti pendidikan rendah, pekerjaan sudah tidak bergensi, siapa saja dapat mengerjakannya. Kondisi demikianlah hendaknya terlihat konsep-konsep yang bersumber dari kearifan lokal, digali dan dikaji untuk menjadi solusi alternatif terhadap fenomena di atas. Oleh karena itu, menyimak uraian di atas, maka dirasa perlu adanya penelitian lebih lanjut menyangkut Posisi Perempuan Dalam Struktur sosial dan Kultur Hukum Bugis Makassar.

PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Kesetaraan Gender

Kondisi perempuan secara umum masih tertinggal. Dalam *Gender Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measurement* (GEM) perempuan dalam berbagai sektor masih lemah. Fakta inilah yang membuat perhatian dunia terhadap penyelesaian masalah dan pemberdayaan kaum perempuan semakin serius. Hasil Konferensi Dunia tentang perempuan yang diadakan oleh PBB di Mexico City, diperoleh gambaran bahwa di banyak negara

³ Lihat Julia Cleves Mosse, *Half the World, Half s Chance: An Introduction to Gender and Development*, alih bahasakan oleh Harianti Silawati dengan gender dan pembangunan (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1996), h. 197—227. bandingkan dengan Irwan Abdullah (ED), *Sangkaan Peran Gender* (Yogyakarta: Putaka pelajar, 1997), h. 253.

status perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Terlepas beragam faktor yang mempengaruhi terbentuknya kondisi tersebut, fakta menunjukkan bahwa kaum perempuan selalu terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah sosial-budaya, ekonomi, pendidikan, politik dan kesehatan.

Upaya untuk meningkatkan status dan kualitas perempuan baik yang dilakukan oleh institusi pemerintah maupun lembaga *civil society*, seperti; LSM, organisasi sosial-keagamaan yang *concern* terhadap masalah perempuan telah banyak dilakukan melalui berbagai strategi alternatif. Satu hal yang akhir-akhir ini banyak menyita perhatian masyarakat adalah semakin kreatifnya desain program *empowering* (penguatan) dan *empowerment* (pemberdayaan) potensi perempuan, seperti; pendampingan, advokasi, fasilitasi, edukasi, dan lain sebagainya. Meski demikian, masalah yang dihadapi perempuan masih saja belum terselesaikan, seperti; kesempatan kerja, beban kerja yang memberatkan, rendahnya tingkat pendidikan, juga meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. Hal ini selain karena dipengaruhi oleh kompleksnya masalah juga intensitas program yang terkadang belum menjawab permasalahan. Tetapi tumbuh-kembangnya peran masyarakat untuk berpartisipasi menyelesaikan masalah perempuan setidaknya dapat dicatat sebagai aset potensial untuk menciptakan peradaban baru yang sensitif keadilan.

Secara konsep, semua manusia menginginkan keadilan dan kesejahteraan. Konsekuensinya, bila suatu masyarakat ditemui relasi yang timpang dan diskriminatif harus dirubah dengan pola yang mengembangkan prinsip keadilan. Karena ketimpangan akan mengganggu semangat untuk sama-sama menikmati kesejahteraan dan iklim kebersamaan. Dengan demikian, mau tidak mau diperlukan serangkaian perubahan struktural yaitu perubahan relasi sosial dari yang timpang ke relasi sosial yang berkesetaraan. Ini mesti dilakukan mulai lingkup terkecil yaitu kehidupan keluarga sampai dalam praktik kenegaraan.

Bila merunut sejarah, jauh-jauh hari dunia telah banyak merespon persoalan perempuan. Tahun 1980 telah diselenggarakan Konferensi Dunia tentang perempuan yang kedua di Kopenhagen. Acara ini untuk melihat kemajuan sekaligus sebagai momentum evaluasi tentang upaya berbagai negara peserta, tentang keikutsertaan perempuan dalam pembangunan. Setelah itu, tahun 1985 juga diadakan Konferensi Perempuan ketiga di Nairobi, dimana salah satu kesepakatannya adalah bahwa gender digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji praktik ketimpangan gender dalam proses sosial, di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya pada tahun 1995, konferensi dunia tentang perempuan yang keempat di Beijing telah menyepakati *Plat-Form of Actions* yang meliputi 12 isu kritis.

Secara etimologis, kata gender berasal dari bahasa Inggris, "gender" berarti "jenis kelamin". Sementara dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku". Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan

bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat, sedangkan menurut Mansour Fakih Gender “suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural”. Sementara Oakley berpendapat “gender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *social constructed*, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh baik kaum laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang”.

Yang dimaksud dengan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bersifat biologis dan bukan merupakan kodrat Tuhan. Adapun perbedaan biologis adalah perbedaan jenis kelamin (*sex*) yang merupakan kodrat Tuhan dan oleh karenanya sejak lahir hingga akhir hayat, secara permanen akan tetap berbeda. Gender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *socially constructed*, yaitu perbedaan yang bukan kodrati atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan dikonstruksi oleh manusia melalui proses sosial dan budaya dalam waktu yang cukup panjang. Dengan demikian, perbedaan gender ini bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat dan bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan perbedaan biologis (*sex*) bersifat tetap, tidak berubah.

Secara lebih jelas perbedaan gender dan seks/jenis kelamin dapat dilihat pada skema ini :

Jenis kelamin (seks)

- Tidak dapat diubah
- Tidak dapat dipertukarkan
- Berlaku sepanjang zaman
- Berlaku dimana saja
- Merupakan kodrat Tuhan
- Ciptaan Tuhan

Gender:

- Dapat berubah
- Dapat dipertukarkan
- Tergantung waktu
- Tergantung budaya setempat
- Bukan merupakan kodrat Tuhan
- Buatan manusia

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *gender* merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam arti ini, laki-laki dan perempuan didefinisikan dari sudut non-biologis.

2. Perbedaan Seks dan Gender

Sejak manusia dilahirkan ke dunia, pada saat itu juga telah membawa beban gender (*gender assignment*). Jika anak lahir mempunyai *penis*, ia dikonsepsikan sebagai anak laki-laki, dan bila lahir mempunyai *vagina*, maka ia dikonsepsikan sebagai perempuan. Adapun terwujudnya beban gender terhadap seseorang, tergantung pada dari nilai-nilai sosial-budaya yang melingkupinya. Misalnya; dalam masyarakat *patrilineal* dan *androsentris*, sejak awal beban gender seorang laki-laki lebih dominan dibanding anak perempuan. Terciptanya model dan sistem kekerabatan di dalam suatu masyarakat memerlukan waktu dan proses sejarah yang

panjang, dan ada berbagai faktor yang turut menentukan, termasuk di antaranya faktor geografis, seperti ekologi. Dalam masyarakat yang hidup di daerah pasir, dimana populasi penduduknya secara kuantitatif tidak begitu banyak, lapangan kehidupan sulit, maka kenyataan ini akan melahirkan sistem sosial-budaya yang khusus. Sebagai contoh; pada masyarakat lintas budaya, pola penentuan beban gender (*gender assignment*) lebih banyak mengacu kepada faktor biologis atau jenis kelamin. Berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam kondisi alam yang subur, tentu hal ini akan melahirkan sistem sosial-budaya tersendiri.

Maka respon atas perbedaan gender di masyarakat sangat beragam, mulai yang moderat sampai liberal. Kelompok moderat cenderung masih menghormati kearifan sosial, namun bagi kelompok liberal cenderung meyakini pentingnya konsep “kesamaan (*sameness*)”. Perjuangan kaum liberal tentu sangat sulit dicapai karena banyak berhadapan dengan budaya maupun nilai agama yang dalam perspektif sosiologis tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan manusia sebagai hamba Tuhan dan makhluk sosial. Peran gender adalah ide-ide kultural yang menentukan harapan-harapan kepada laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya di dalam masyarakat. Pergaulan sehari-hari pada masyarakat yang menganut perbedaan gender, terdapat nilai *tatakrama* dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Setiap orang seolah-olah dituntut mempunyai perasaan gender (*gender feeling*) dalam pergaulan. Jika seseorang menyalahi nilai, norma, dan perasaan tersebut, maka yang bersangkutan akan menghadapi resiko di masyarakat.

Terdapatnya predikat laki-laki dan perempuan, dianggap sebagai simbol status. Laki-laki diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kejantanan (*masculinity*), sedangkan perempuan diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kewanitaan (*femininity*). Perempuan dipersepsikan sebagai makhluk cantik, langsing, dan lembut. Sebaliknya laki-laki dipersepsikan sebagai makhluk cerdas, dalam banyak hal, lebih kuat, perkasa, pemberani, tegas, dan agresif. Anggapan-anggapan budaya seperti ini dengan sendirinya memberikan peran yang berbeda dan lebih luas kepada laki-laki, karena laki-laki mendapat status nilai sosial yang relatif tinggi dibandingkan perempuan. Pengalaman yang ada di masyarakat, tidak sedikit kasus-kasus sosial mengalami ketegangan gender. Satu sisi perempuan tetap memiliki keinginan untuk bergerak secara leluasa guna meningkatkan status dan rasa percaya diri, tetapi budaya masyarakat setempat membatasi keinginan tersebut. Pada saat ini perempuan menghadapi beban ganda (*double burden*). Satu sisi mereka perlu berusaha sendiri tetapi di lain pihak harus konsisten mengasuh anak dan mengurus keluarga. Sementara laki-laki selain mereka terbebas dari fungsi-fungsi reproduktif seperti; mengandung, melahirkan, menyusui, menstruasi, diakui ataupun tidak budaya masyarakat menuntut laki-laki untuk berperan lebih besar di sektor non-keluarga (*nonfamily role obligations*). Maka hal ini, akan menggambarkan bahwa ada signifikansi antara perbedaan

gender dengan status sosial. Semakin besar perbedaan itu, maka semakin besar pula terjadinya ketimpangan sosial, begitu sebaliknya.

3. Implikasi Ketidakadilan Gender

Tak ada “suatu persoalan tidak membawa persoalan baru”, begitulah kata salah satu tokoh post-modernisme Habermas ketika masa mudanya. Begitupun dengan persepsi yang bias terhadap posisi perempuan dalam ruang-ruang sosial. Di antara implikasi dari ketidakadilan dimaksud meliputi:

a. Marjinalisasi Perempuan

Proses marjinalisasi yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang, seperti penggusuran dari kampung halamannya, eksploitasi dan sebagainya. Namun pemiskinan atas perempuan maupun atas laki-laki yang disebabkan karena jenis kelaminnya adalah merupakan salah satu bentuk ketidak-adilan yang disebabkan oleh faktor gender. Sebagai contoh, perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki. Sebaliknya, banyak lapangan pekerjaan yang menutup pintu bagi laki-laki karena anggapan bahwa mereka kurang teliti melakukan pekerjaan yang memerlukan kecermatan dan kesabaran.

b. Subordinasi

Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Pandangan seperti ini telah lama mengendap di masyarakat yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan dalam konteks ini seolah tidak memiliki kemampuan untuk berdedikasi dan beraktualisasi secara nyata untuk ikut serta merancang bangun peradaban yang lebih progresif. Banyak sajian data penelitian dengan varian metode dan pendekatannya memperlihatkan bahwa masyarakat secara umum masih membatasi ruang gerak perempuan di berbagai sektor kehidupan. Kondisi semacam itu telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

c. Pandangan Stereotype

Pelabelan atau penandaan (*stereotype*) yang seringkali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Bila dirunut ke belakang, akar-akar *stereotype* yang melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi di berbagai sektor kehidupan sosial bersumber dari pandangan gender, karena salah satu jenis kelamin dibentuk dan dilabelkan memiliki nilai “lebih” sementara jenis kelamin lain memiliki nilai sebaliknya. Inilah gaya berpikir oposisi biner yang terus menyebar tanpa kritik dan koreksi. Dalam gaya berpikir seperti ini dunia kehidupan sosial selalu diidentifikasi ke dalam siang-malam, hitam-putih, dan tidak ada selain itu. Begitupun terkait dengan peran sosial. Laki-laki sering diposisikan sebagai orang yang segalanya pantas berpartisipasi dalam kerja-kerja sosial, sementara kaum perempuan kurang pantas melakukan hal itu.

d. Kekerasan

Pelaku kekerasan yang bersumber dari timpangnya relasi gender, bermacam-macam. Ada yang bersifat individual seperti; kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri, maupun bersifat sosial yaitu kekerasan sebagaimana terjadi di tempat umum atau masyarakat dan negara.

- Eksploitasi terhadap perempuan
- Pelecehan seksual terhadap perempuan
- Perkosaan
- Pria berpostur pendek seringkali dilecehkan

e. Beban Kerja

Bentuk diskriminasi gender lainnya adalah terkait dengan beban kerja yang timpang. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya, sebagian kecil dilakukan oleh laki-laki, dan perempuan banyak menanggung serangkaian pekerjaan. Dan pekerjaan rumah tangga seperti ini biasanya tidak dihargai sebagai pekerjaan sebanding suami mencari nafkah di luar rumah, namun hanya dihargai sebagai suatu kegiatan biasa.

- Perempuan bekerja di luar dan di dalam rumah
- Perempuan sebagai perawat dan pendidik anak, sekaligus pendamping suami dan pencari nafkah tambahan
- Perempuan pencari nafkah utama dan mengurus rumah tangga

4. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keamanan nasional serta menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Ketidakadilan dirasakan sebagai diskriminasi yang menempatkan perempuan dalam status di belakang kaum laki-laki telah memacu kaum perempuan untuk berjuang memperbaiki status, peranan dan kedudukannya dalam keluarga dan masyarakat. Penolakan terhadap masuknya perempuan dalam bidang profesi dan pekerjaan, lebih disebabkan karena dia seorang perempuan, bukan karena kemampuannya yang kurang dari kaum laki-laki. Kondisi semacam ini terjadi karena adanya citra baku (stereotype) mengenai perempuan dan laki-laki, dimana masyarakat menempatkan perempuan lebih banyak kepada peran dalam sektor domestik (rumah tangga) dan laki-laki bekerja di sektor publik yang produktif (bukan reproduktif) untuk menopang ekonomi rumah tangga. Karena pembakuan peran inilah maka laki-laki lebih diutamakan untuk memperoleh

pendidikan dan keterampilan dibandingkan kaum perempuan. Situasi kaum perempuan di Indonesia pada berbagai daerah termasuk Sulawesi Selatan cenderung mirip satu sama lain. Setelah menikah, perempuan diharapkan untuk mengikuti aturan sosial yang ada dalam masyarakat, yaitu mengurus suami dan anak. Oleh karena itu perempuan di Indonesia mungkin berada dalam resiko kekerasan berbasis gender, terlepas dari latar belakang etnis dan agamanya.

5. Perempuan Dalam Kontruksi Budaya Bugis Makassar

Unsur-unsur kesatuan masyarakat terdapat dalam tradisi sikap, serta bahasa yang membedakannya dengan kesatuan masyarakat lainnya. Dalam banyak tulisan, kelompok masyarakat yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan ini disebut dengan suku Makassar. Kendati demikian, dalam pembicaraan sehari-hari kedua suku besar yang bermukim di Sulawesi Selatan, suku Bugis dan suku Makassar, lebih lazim disatukan menjadi suku Bugis Makassar. Dalam kenyataannya, memang tidak banyak perbedaan, dan perbedaan yang menonjol hanyalah pada bahasa yang digunakannya.

Berdasarkan penelaahan A. Mattulada dalam disertasinya yang berjudul *Latoa*, bahwa dari sudut pandang antropologi politik terletak pada totalitas kebudayaan Bugis Makassar terhadap lima unsure dari *panngaderreng*⁴ yakni:

- a. *Ade*, adalah aturan perilaku dalam masyarakat yang berupa kaidah kehidupan yang mengikat semua warga masyarakat,
- b. *Bicara*, adalah aturan peradilan yang menentukan sesuatu hal yang adil dan benar dan sebaliknya curang atau salah,
- c. *Wari*, berupa aturan ketatalaksanaan yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajaran dalam hubungan kekerabatan dan silsilah.
- d. *Rapang*, adalah aturan yang menempatkan kejadian atau ikhwal masa lalu sebagai teladan atau kejadian yang patut diperhatikan atau diikuti bagi keperluan masa kini.
- e. *Sara*, adalah aturan atau syariat Islam yang menjadi unsure *panngaderreng* pada sekitar tahun 1611M, di kala Islam diterima sebagai agama resmi dan umum pada masyarakat Bugis Makassar.

Konsepsi masyarakat suku bugis makassar dapat dikaji antara lain melalui etos galigo, pantun dan cerita rakyat dalam naskah lontara. Misalnya, dalam epos galigo istilah perempuan identik dengan kata *awiseng* atau *makkunrai* yang dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai *belo jajareng* (hiasan rumah) atau *ati goari* (isi bilik). Bagi perempuan yang berstatus istri diharapkan untuk menjadi *mulu jajareng* bagi suaminya (menyelenggarakan urusan rumah tangga) dan *tanrere alebirena oroane pawekke engngi* (memelihara martabat suami yang mengagumkannya). Istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa pada zaman

⁴ A. Mattulada, *Latoa. Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* Disertasi Universitas Indonesia (UI) dalam tahun 1975 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), h. 333.

Sawerigading, perempuan yang dianggap ideal ialah mereka yang terampil dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan rumah tangga, melayani kepentingan suami. Ungkapan pemaknaan yang seperti di atas, banyak ditemukan dalam syair nyanyian rindu atau kenangan asmara laki-laki yang sedang kasmaran. Salah satu lontara Bugis mengungkapkan sebagai berikut:

Massisenge'si makkeda to panra nawa-nawa erokko iya kuluru' mengngerangngi temmallupai wi wajo ale mappata uleng teppuna Palopo. Luse gessa palallo-na. Rupa maddaumpoddin-na. Timu bekke' situtu'na. Jika isi mapute-na. Ellong mallerek-lerekna. Ennying patae-taena. Bulu mta maincak-na. Turun rupa samanna-e dettia mamula cabbeng, Tikka mammulu tarenre. Menrekten-na selo-selo ellung mattengnga bitara. Turun-rupa palallo-na.

Artinya:

Berkata pula To Panrenawa-nawa sambil melayangkan kenangannya. apabila kuingat kembali bayangan tubuh Uleng Tepunna Palopo. Bentuk tubuhnya yang tiada bandinigannya, betis bundarnya yang menarik, rambutnya yang panjang berombak, dahinya yang tiada tercela, raut wajahnya yang berbentuk oval, bibirnya yang merekah, deretan giginya yang putih, batang lehernya nan berlarik-larik, keningnya nan lancip, bulu matanya nan lentik, roman mukanya yang bagaikan matahari sedang terbit, sang surya yang menanjak naik ke langit tanpa tertutup awan, raut wajahnya yang tiada bandingan.

Walau ungkapan di atas dapat dinilai bahwa perempuan memiliki ruang gerak hanya pada wilayah domestik. Tetapi, saat ini mengalami banyak perubahan dan perempuan dan tidak dipermasalahkan oleh warga Sulawesi Selatan, pertanda adanya perubahan status dan peranan perempuan, halmana juga berarti perubahan struktur sosial dan otonomi termasuk bagi perempuan-perempuan pedesaan. Status sosial perempuan Bugis tampaknya cukup tinggi. Hal itu dapat kita lihat baik dalam realitas sosial maupun dalam naskah kuno. Secara sosial kita bisa menyebut sosok Colliq Pujié, seorang perempuan Bugis yang hidup pada abad ke-19 yang berprofesi sebagai penulis, sastrawan dan juga negarawan. Dalam naskah kuno perempuan Bugis disebut berani (*materru'*) dan bijaksana (*malampé' nawa nawa*).

Walau begitu, tugas utama dari seorang perempuan Bugis adalah menjadi seorang ibu yang salehah, baik dan tulus (*mancaji Indo ana tettong ridécéngngé, tudang ripacingngé*), menjadi penuntun suami yang jujur, hemat dan bijaksana sekaligus mitra pendukung dan penopang dalam mengatasi segala kesulitan maupun perjuangan dalam mengatasi segala hal (*Mancaji pattaro tettong rîlempu'é punnai cirinna enrengngé lampu 'Nawa-Nawa mméwai sibaliperri' waroanéna Sappa 'laleng atuong*), menjadi kebanggaan ayahnya, saudaranya dan suaminya untuk menjaga kehormatan hidupnya (*mancaji 'siatutuiang siri na enrengngé banapatinna ritomatoanna, risiléssureng macoana letih' ga riworoanéna*)

Posisi, gelar, dan profesi seorang Ibu sangat dijunjung tinggi dalam tradisi dan budaya Bugis-Makassar. Oleh karena itu seorang ibu harus kemudian menjaga kesucian, kesalehan dan kecerdasannya. Seorang ibu harus selalu meng-update

pengetahuannya. Seorang ibu sangat penting untuk membaca dari waktu ke waktu membantu meningkatkan kesadaran dan visi. Ibu adalah jendela pertama bagi seorang bayi dan menjadi pengontrol bagi suaminya. Ketika bayi lahir, Ibu memainkan peranan penting dalam memperkenalkan bayi kepada dunia. Masa depan anak sangat tergantung pada ibu. Sikap, pandangan dan seluruhnya semua diperoleh sang bayi dari seorang ibu. Seorang ibu yang sempurna akan lebih baik dari seribu guru.

Pada sisi suami, seorang perempuan adalah manajer (*Pattaro*). Semua hal yang datang dan masuk ke sebuah rumah harus sepengetahuan dan seizin istri. Dalam rumah tangga ia adalah "ratu", menggantikan posisi suami jika sedang tak ada di rumah untuk menjaga diri dan harta benda. Oleh karena itu perempuan Bugis harus juga pandai berhemat, cermat dan mengetahui kebutuhan dan kepentingan rumah tangga. Oleh karena itu perempuan bugis-makassar ketika memutuskan untuk menikah maka seluruh pilihan hidupnya harus dicurahkan sepenuhnya kepada rumah tangga. Setelah itu kemudian baru bisa memilih ruang publik sebagai aktivitas berikutnya, manakala urusan rumah tangganya telah selesai dengan sempurna. Secara umum, manusia Bugis Makassar percaya bahwa keunggulan pribadi yang menempatkannya pada posisi sosial yang lebih tinggi. Hal ini tercermin dari beberapa istilah-istilah antara lain; *kacaraddekang*, *kabaraniang* dan *kakalumannyanggang*.⁵

Hubungan antara laki-laki dan perempuan dilandasi oleh nilai *sipakatau*, saling memanusiaikan yang mewujudkan kenyataan dimana tercipta perasaan *masseddi siri*, rasa kebersamaan dan kesesamaan antar dua jenis kelamin. Hubungan antar keduanya juga didasar oleh nilai sipakatau. Kearifan semacam ini dijadikan pula sebagai bekal budaya oleh perantau Bugis yakni *pappaseng* (pesan dan petuah) untuk memelihara nilai sipakatau dengan siapa pun, menjaga dan memelihara *tana akkinanreang*, negeri pencarian nafkah dan menjalankan kehidupan merupakan kearifan yang menelorkan prinsip dimana langit dijunjung, bumi dipijak, disitulah negeri kita. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban menjaga hubungan baik, pemahaman dan saling pengertian dengan sesama manusia serta kewajiban menjaga dana memelihara negeri.

6. Nilai-Nili Kesetaraan Dalam Naskah Lontarak

Nilai kesetaraan dalam budaya Bugis Makassar tercermin dari pemahaman akan konsep "*Tau*" atau "*To*" dalam terminologi Bugis-Makassar adalah manusia, dalam perspektif kebudayaan Sulawesi Selatan dianjurkan memiliki *sipa' tau* (sifat manusia). Artinya bahwa karakteristik sifat manusia harus merujuk pada sistem nilai dan norma-norma masyarakat Sulawesi Selatan. Konsep '*tau*' dalam kebudayaan ini merupakan spirit dalam memperoleh wujud kesempurnaan manusia

⁵ Rachmah, *et al.*, *Monografi Kebudayaan Makassar di Sulawesi Selatan* (Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, 1984), h. 54

yang biasa di simbolkan sebagai *sulapa appa* walasuji (segi empat belah ketupat) yang menurut Mattulada dapat juga disimbolkan dengan huruf aksara lontara yaitu /sa/ yang dapat di artikan sebagai *Dewata Seuwae* (Tuhan Yang Maha Esa). Dalam tradisi Makassar, disebutkan: "*Nikanaya sulapak appakna taua iami antu niak sirikna, niak paccekna, niak pangngalikna, na todong pangngadakkangna*". (yang disebut manusia berhati 'sulapa appa' yaitu manusia yang memiliki harga diri, memiliki rasa kesetiakawanan, menghargai orang lain dan memiliki sifat sopan santun).

Dari implikasi tersebut akan ditemukan bahwa konsep 'tau' di Sulawesi Selatan pada dasarnya berimplikasi dari konsep *sulapa appa*, yang dapat diperoleh dari '*magguru*' (belajar) dan *massompe* (merantau). Implementasi konsep tersebut menghantarkan perilaku sipakatau (saling memanusikan), *sipakalebbi* (saling memuliakan), *sipakatuo* (saling menghidupi), dan *sipakatokkong* (saling membantu). Sehingga jelas bahwa falsafah tersebut selain sebagai wasiat kebudayaan, juga menjadi sebuah sistem nilai dalam pedoman hidup masyarakat Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, masyarakat Sulawesi Selatan dikenal memiliki keunggulan diaspora (menyebarkan dan hidup mandiri). Tidak sedikit masyarakat Sulawesi Selatan mencapai keberhasilan dan kesuksesan di luar tanah kelahirannya. Mereka berpijak pada prinsip-prinsip yang dianutnya sebagai sebuah falsafah hidup. Namun demikian bukan berarti semuanya berhasil, ada juga diantara beberapa diantaranya yang melebur dalam kehidupan yang justru memalukan (*mappakasiri*). Karena itu, dituntut untuk memiliki konsep hidup sebagai sebuah falsafah kebudayaan; yaitu: **warani** (berani), **lempu** (jujur), **sugi** (kaya) dan **acca** (pintar). Bila dirangkai dalam Bahasa Bugis menjadi : "*macca na malempu, warani na magetteng*" (*pandai dan jujur, berani dan teguh bertindak*).

Manusia yang memiliki dan mengamalkan keempat sifat ini secara menyeluruh akan menjadi Tu Panrita, menjadi manusia seutuhnya (insan kamil). Sudah barang tentu manusia yang utuh adalah manusia yang senantiasa memelihara dan mengembangkan fitrahnya sebagai manusia. Hanya manusia seperti ini yang akan terbebas dari alienasi maupun tipu daya dunia yang seringkali menyesatkan. Senada dengan hal itu, inti budaya orang Bugis adalah siri (malu) yang mengintegrasikan semua unsur *pangaderreng*. Pada prinsipnya nilai-nilai utama kebudayaan Bugis adalah kejujuran (*alempureng*), kecendekiawan (*amaccang*), kepatutan (*asitinajang*), keteguhan (*agetengen*) dan usaha (*reso*), juga siri (harga diri/malu), disamping itu ada juga nilai-nilai keprawiraan (*awaraningeng*), kesabaran (*asabbarakang*), kekayaan (*asugireng*), saling menghidupi (*sipatuo*), saling membangun (*sipatokkong*).⁶

Pappaseng yang kata dasarnya berarti pesan atau wasiat, dengan demikian *Pappaseng* adalah kumpulan amanat keluarga atau orang-orang bijaksana yang

⁶ Rahman Rahim, *Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis* (Ujung Pandang Lepas Unhas, 1985), h. 13

diamanatkan secara turun temurun dengan tutur yang berusaha dihafalkan. Selanjutnya *Pappaseng* ditulis atau dicatat dalam *lontarak* dan dijadikan sebagai pusaka turun temurun. Sehingga *Pappaseng* (Makassar: *Pappasang*) merupakan salah satu jenis tulisan dan merupakan bagian dari jenis sastra *lontarak* Bugis, dalam pengungkapan *Pappaseng* terdapat beragam bentuk, diantaranya bentuk *elong* (prosa atau puisi, *werekkada* (peribahasa) mauun *pau-pau* (peribahasa), maupun percakapan. Di kalangan masyarakat Bugis, *pappaseng* yang sangat dikenal antara lain: *Pappaseng* yang berasal dari *Tomaccaé ri Luwu*, *Kajao Laliddong ri Boné*, dan *Arung Bila ri Soppéng*. Ketiga tokoh tersebut dikenal sebagai orang arif dan bijaksana, pada umumnya ditemukan dalam *Lontarak attoriolong* di berbagai daerah Sulawesi Selatan.⁷

a. Nilai-nilai yang Berkaitan dengan Kegotongroyongan

Ada pernyataan menarik dari orang Belanda bahwa orang Bugis-Makassar tidak boleh menjadi tentara karena tidak disiplin, semuanya mau jadi komandan. Dan sifat ini terlihat ketika berlayar tidak mau kalah dan harus selalu menjadi *pongawa*.⁸ Namun, di balik watak yang keras itu, terdapat pula sikap positif bahwa masyarakat Sulawesi Selatan, meskipun tradisional tetapi paling dinamis dan memiliki solidaritas dan sifat kegotongroyongan. Hal ini terungkap dalam *pappaseng* berikut ini:

Malik siparappeki

Rebba sipatokkokki

*Siri menre, tessirik nok*⁹

Maksudnya:

Kalau kita hanyut bersama, hendaknya saling menyelamatkan,

Kalau kita tumbang bersama hendaknya saling mengangkat,

Kalau kita mujur berprestasi menanjak, pantang untuk diturunkan.

Dengan demikian, seandainya dalam masyarakat Sulawesi Selatan berkembang masyarakat oposisi, yakni setiap orang yang akan naik ditarik kakinya ke bawah, berarti suatu penyimpangan terhadap isi *pappaseng* tersebut. Dalam hal prinsip kerja sama antara perempuan dan laki-laki, maupun antara sesama perempuan atau sesama laki-laki, betapapun beratnya tugas dan pekerjaan yang dilakukan akan menuai keberhasilan dengan menjalankan prinsip kerja sama ini. Sikap gotong royong atau kerja sama sebagai tuntunan hidup termanifestasikan dalam ungkapan-ungkapan *pappasang* misalnya sebagai berikut:

1. *Gaug tamakkulea nitungalengi, aqbunduka manna barani*

⁷ Mattalitti, M. Arif, dkk.. *Pappaseng To Riolutak* (Ujung Pandang: Balai Penelitian Bahasa, 1986), h. 4.

⁸ Andi Rasdiana Amir dkk. *Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1982), h. 54.

⁹ Andi Rasdiana Amir dkk. *Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1982), h. 55.

“pekerjaan tidak dapat mengandalkan diri sendiri, berperang meskipun berani”.

2. *Gaug tamakkulea nitungalengi, aqseboka manna gassing*
‘pekerjaan tidak dapat mengandalkan diri sendiri, menarik sesuatu meskipun kuat’
3. *Gaug tamakkulea nitungalengi, tanaya manna panrita*
‘pekerjaan tidak dapat mengandalkan diri sendiri, bertani meskipun dia ahlinya’

Sehubungan dengan sifat penolong, dalam ajaran local wisdom mangkasara sejalan dengan ajaran Islam bahwa orang yang senang menolong akan mendapatkan pahala yang besar. Ungkapan-ungkapan tersebut antara lain:

1. *Taena lompona pahalaana appakoddoka tau cipuruq*
Tidak ada yang lebih besar pahalanya member makan orang yang lapar
2. *Taena lompona pahalana appalappasaka tau tekeq*
Tidak ada yang lebih besar pahalanya membantu orang keluar dari kesulitannya

Dalam budaya Bugis Makassar, laki-laki atau pun perempuan diingatkan untuk senantiasa menjada diri agar tidak membuat malu keluarga (*appakasiriq*). Terhadap perempuan dinasehatkan untuk memperketat menjaga diri karena perempuan diibaratkan sesuatu yang gampang pecah dan hancur, seperti dalam pesan berikut:

Tugguruna bainea singkamma tugguruna bayaoa na tugguruna buraqnea singkamma tugguruna kalukua.

Jatuhnya perempuan ibarat jatuhnya telur, dan kejatuhan laki-laki ibarat jatuhnya kelapa dari pohonnya.

Kapanrakanna bainea ampelaki ririqna

Kehancuran perempuan, adalah yang membuang malu/martabat/harga dirinya.

Siriq na pace dalam realitas kehidupan Makassar, terungkap dalam pesan-pesan sebagai pedoman hidup, seperti

- | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | <i>Siriq paccea ri katte</i> | Harga diri kita |
| | <i>Kontu ballaq ia benteng</i> | Andaikan rumah ia adalah tiang |
| | <i>Ia pattongkoq</i> | Ia atap |
| | <i>Ia todong jari rinring</i> | Ia juga dinding |
| 2 | <i>Siriq paccea ri katte</i> | Harga diri kita |
| | <i>Rapangi seqre biseang</i> | Ibarat sebuah perahu |
| | <i>Ia gulinna</i> | Dia sebagai jangkarnya |
| | <i>Ia todong sombalaqna</i> | Dia pula sebagai layarnya |
| 3 | <i>Siriq paccea ri katte</i> | Harga diri kita |
| | <i>Ia ceraq ia assi</i> | Ia darah sekaligus daging |
| | <i>Ia bukunta</i> | Ia tulang kita |
| | <i>Ia pokoq tallasatta</i> | Ia sumber kehidupan kita. |

Dalam pergaulan dan berinteraksi, tertitip pesan untuk laki-laki dan perempuan agar senantiasa bertindak dan berperilaku sewajarnya, tidak berlebihan, dan senantiasa menjaga harkat dan martabat (*siriq*), pesan itu seperti berikut;

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | <i>Pauangi bunga eja</i> <i>Nakatutui rasanna</i> <i>Manna mabauq</i> <i>Teai nabauq dudu</i> | Beritahu si bunga merah Supaya menjaga keharumannya Meskipun ia wangi Janganlah terlalu semerbak |
| 2 | <i>Pauangi tabo rappo</i> <i>Nakatutui tinggina</i> <i>Manna matinggi</i> <i>Teai taqlayuq dudu</i> | Beritahu seludang pinang Agar memelihara ketinggianya Walau ia tinggi Janganlah terlalu menjulang |

b. Nilai-nilai yang berkaitan dengan keteguhan hati

Dalam bahasa Bugis, keteguhan dapat disebut *getteng*, yang dapat pula diartikan *tegas*, *tangguh*, dan *teguh* pada keyakinan dan taat asas. Dalam kaitannya dengan keteguhan ini, terdapat *pappaseng Arung Bila*, yang dikutip berikut ini:

"*Tellu riyala toddok*: (Ada tiga hal yang dapat dijadikan patokan) yaitu:

Getteng, (Keteguhan)

Lempu, (Kejujuran)

Ada tongeng (Ucapan benar)

Nilai-nilai kesabaran, misalnya

1. *Antu pokoqna nikanaya gaug bajiqq, sabbaraka, lambusuka na tambung*
Dasar perbuatan baik ialah sabar, jujur dan ikhlas
2. *Pammentenganna nikanaya gaug sabbaraq, manggaukang ri mallaka.*
'Dasar dari perbuatan sabar dari Takwa
3. *Pammentenganna nikanaya gaug sabbaraq, manggaukang passuroang na mappakabella pappisangka.*
Dasar dari perbuatan sabar adalah melakukan perintahNya dan menjauhkan laranganNya

Dalam memutuskan suatu perkara, dalam budaya Makassar terdapat pesan-pesan yang menggambarkan perlunya pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan, misalnya:

1. *Tangarakai ikau pareqnu, nanualle anrong guru*
'pertimbangkan keputusanmu, jadikanlah pelajaran
2. *Tangarakai ikau pareqnu, nanutapesang makodia, nanualle bajika.*
Pertimbangkanlah keputusanmu, jauhkan yang buruk dan ambil yang baik.
3. *Tangarakai ikau pareqnu, naipa nanupasuluki ri bawanu taenapa kodina.*
Pertimbangkanlah keputusanmu, kemukakanlah jika sudah tidak ada lagi buruknya.

c. Nilai-nilai yang berkaitan dengan keberanian

Nilai-nilai yang berkaitan dengan keberanian digambarkan dalam *pappaseng* Arung Bila sebagai berikut:

“*Akguruiwi gaukna to warani-é, enrenng-é ampéna, apak iya gaukna to warani-é, seppuloi wawangenna seuwana jana. Jajini asera decenna. Iyanaro nariyaseng maja seddi-é nasabak matei. Naé topellorenng-é maté muto.*

Naiya decenna to warani é; Seuwani, tettakkini napolei ada maja. Maduawanna, tennajampangiwi kareba-é. Matellunna, temmatau-i ripalao ri yolo. Maeppana, temmatau-i ri paonro ri munri. Malimanna, temmatau-i mita bali. Maennenna, ri asirik-i. Mapitunna, riala-i passappo ri wanuwa-é. Maruwana, Matinuluk-i pajaji passurong. Maserana, rialai pakdekbak tomawatang. Dikutip oleh Mattaliti (1986:24).

Dalam *pappaseng* tersebut diungkapkan bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pemberani, dan itu sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Keberanian harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

d. Nilai-nilai yang berkaitan dengan Kecendekiaan

Kecendekiaan dapat diuraikan asal katanya, yakni dari kata cendekia yang berarti: *tajam pikiran; lekas mengerti, cerdas, pandai*. Dalam hal ini *kecendekiaan* dapat diartikan sebagai kepandaian menggunakan kesempatan, kecepatan mengerti situasi dan mencari jalan keluar. Nilai-nilai yang berkaitan dengan kecendekiaan dapat digambarkan dalam *pappaseng* berikut ini:

Misalnya ;

Lapa nakulle tau'e mabbaine narekko naulleni manggulilingiwi darupeng e wekk pitu (h. 7) (Apabila seorang ingin beristri, ia harus sanggup mengelilingi dapur tujuh kali)

Dapur di sini adalah sebagai perlambang masalah pokok dalam kehidupan rumah tangga, dan penyebutan angka tujuh merupakan perlambang jumlah hari yang terus berulang ulang. Sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, calon suami harus menyelami sedalam-dalamnya seluruh tanggung jawab yang akan dipikulnya. Hal itu perlu disadari dg sungguh-sungguh sebab tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga ada di tangan suami.

Ungkapan persamaan derajat lainnya;

“*akkai padamu rupa tau natarereko*” (h. 12) (Angkatlah sesamamu manusia supaya engkau ditunjang)

Maksud ungkapan di atas, bahwa bila menginginkan penghargaan dari orang lai, mulailah dengan menghargai lebih dahulu. Suatu penghargaan akan datang karena ada sesuatu yang patut dihargai, yakni tahu menghormati dan menghargai orang lain.

“*tesissekeng tigoro, tassicalakeng tange*” (Tidak saling mencekik leher, tidak saling menutup pintu)

Maksudnya, hendaknya manusia saling membukakan jalan dan melapangkan hati, tolong menolong dalam mencari resek, sebab nilai manusia bukan ditentukan oleh apa pemberiannya, tetapi apa yang ia berikan.

“Rebba sipatokkong, mali siparappe sirui menre, tessirui noo, malilu sipakainge, maingeppi mupaja” (h. 13) (Saling menegakkan, bila terhanyut saling mendamparkan, saling menopang dalam kekurangan, dan tidak saling menjatuhkan, bila khilaf saling mengingatkan, dan nanti berhenti bila saudara tersadar dalam khilafnya).

Maksudnya, rebah saling menegakkan, artinya bersama-sama berpijak dengan teguh dan berdiri dengan megah di atas kehidupan. Hanyut saling mendamparkan, artinya tolong menolong dari kesulitan. Tidak ada jalan kehidupan tanpa rintangan, sehingga perlu saling mengingatkan ke Jalan yang benar. Jika semua hal itu sudah diwujudkan, maka terwujudlah gotong royong yang sempurna. Keberadaan manusia memenag sebagai makhluk sosial, artinya manusia yang satu dengan manusia lainnya saling berhubungan dan saling membutuhkan. Terdapat saling ketergantungan dan keterkaitan antar sesama.

Mau melle mabela e, mau teppekua mabbali bola e (h. 13) (Walau merasa yang jauh, tidak bias diabaikan yang bertetangga)

Maksudnya, banyak hal, bilamana kesulitan mendadak menimpa seseorang, tetanggalah menjadi tumpuan harapan terdekat, bukan sanak keluarga atau sahabat dekat yang berada di tempat jauh. Makanya hubungan dengan tetangga tidak dapat diabaikan dan dikesampingkan.

Narekko teyako risarompeangi lipak, ajak mutudang ri wiring laleng (h. 16) (Kalau tidak sudi diserempet sarung, janganlah duduk di pinggir jalan)

Maksudnya, kalau duduk di tepi jalan kemungkinan besar akan diserempet sarung, sebab jalanan adalah tempatnya orang berlalu lalang. Demikian pula dalam kehidupan ini, janganlah duduk di tempat hina bila tak sudi tercemar oleh kehidupan, atau bila tidak ingin dilanda pasang, jangan berumah di tepi pantai.

Narekko teyako ripau ripadammu rupa tau aja mutettong ri kapang e (h.16) (Bila tidak ingin dipergunjingkan orang, jangan berbuat yang mencurigakan)

Pada dasarnya, semua orang tidak senang diperbincangkan keadaannya oleh orang lain lebih-lebih bila mengandung hal yang tidak baik. Oleh karena itu, layaklah jika kita menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan dugaan yang bukan-bukan, apalagi melakukannya. Solusi konflik dalam budaya Bugis Makassar termasuk dalam hal ini konflik dalam hubungan laki-laki dan perempuan, diselesaikan dengan menggunakan metode sesuai pengadereng yaitu mediasi yang dilakukan oleh *tautongeng lempa wali-wali* (mediator-mediator jujur, tidak berat sebelah dan disegani oleh kedua belah pihak), dialog (*mappasiduppa ada tongeng*) antar tokoh kedua belah pihak, musyawarah (*tudang sipulung mappalalo repo*) kedua belah pihak rekonsiliasi (*madeceng*) yang disertai dengan upacara adat secara bersama-sama, dan pelaksanaan hukum secara adat bagi yang terbukti bersalah sebagai pemicu dan pelaku konflik, setelah melalui proses mediasi, dialog

dan musyawarah serta telah meneliti secara seksama *appongeng tengengtongenna gawk-e*. pangkal mula sesungguhnya perbuatan yang melahirkan konflik.

PENUTUP.

Lontara' Pappaseng (Lontara' pepatah atau kata bijak) adalah sekumpulan pedoman hidup yang berisi petuah tentang sebab akibat yang berlaku pada masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Lontara' Pappaseng merupakan kumpulan amanat atau pesan orang-orang bijak, orang terkemuka atau keluarga, yang ditulis dan disuratkan, kemudian diwariskan secara turun temurun. *Paseng* semacam ini dijadikan kaidah hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan:

1. Nilai kesetaraan dalam budaya Bugis Makassar tercermin dari pemahaman akan konsep "*Tau*" atau "*To*" dalam terminologi Bugis-Makassar adalah manusia, dalam perspektif kebudayaan Sulawesi Selatan dianjurkan memiliki *sipa' tau* (sifat manusia). Artinya bahwa karakteristik sifat manusia harus merujuk pada sistem nilai dan norma-norma masyarakat Sulawesi Selatan.
2. *Pappaseng* dan nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya, dan dijadikan sebagai tatanan hidup masyarakat dalam kaitannya dengan posisi perempuan dalam kultur hukum Bugi Makassar ditempatkan posisi yang strategis. Status sosial perempuan Bugis tampaknya cukup tinggi. Hal itu dapat kita lihat baik dalam realitas sosial maupun dalam naskah kuno.
3. Beberapa contoh *pappaseng* dan nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya, dan dijadikan sebagai tatanan hidup masyarakat, sebagai berikut:
 - a) Nilai-nilai yang berkaitan dengan kejujuran, b) Nilai-nilai yang Berkaitan dengan Etos Kerja c) Nilai-nilai yang Berkaitan dengan Kegotongroyongan d) Nilai-nilai yang berkaitan dengan keteguhan hati e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan keberanian f) Nilai-nilai yang berkaitan dengan Kecendekiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan (ED), *Sangkaan Peran Gender*. Yogyakarta: Putaka pelajar, 1997.
- Ahmad, Khursyid . *Fanaticism, Intolerance and Islam*, diterjemahkan oleh AS. Robin dengan judul *Menjawab Tuduhan Barat Ketidaktoleransian, Fanatisme dan Hak-hak Asasi Manusia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1993.
- al-Ansariy, Abu Yahya Zakariya. *Fat al-wahhab*, II. t.tp: Dar al-Fikr, t. th.
- al-Ansariy, Ibn Mansûr Jamal al-Din bin Muhammad Mukarram. (disebut Ibn Mansûr), *Lisan al-'Arab*, III. Mesir: al-Muassasat al-Misriyyat al-'Ammat li al-Ta'lif wa al-Anba' wa al-Nasr, t.th.
- Ali, Muhammad. *Penelitian Prosedur dan Strategi*. Bandung ;Angkasa, 1985.
- Amir Andi Rasdiana. dkk. *Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi*. Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1982.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta:Bina Aksara, 1985.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988,
- Enre, Fachruddin Ambo. *Ritumpanna Welenrennge. Telaah Filosofis Sebuah Episode Sastera Bugis Klasik Galigo* (Disertasi Universitas Indonesia (UI) Jakarta; tidak dipublikasi].
- Haddade dalam Muh.Naim Haddade. *Ungkapan, Pribahasa, dan Paseng: Sastra Bugis*. Jakarta : Depdikbud, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah,1986.
- Haddade. Muh. Naim. *Ungkapan, Pribahasa, dan Paseng: Sastra Bugis*. Jakarta : Depdikbud, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah,1986.
- M. Ide Said DM, *Kamus Bahasa Bugis-Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1977), h. 4.
- Mattalitti, M. Arif, dkk.. *Pappaseng To Riolutak*. Ujung Pandang: Balai Penelitian Bahasa,1986.
- Mattulada, A. *Latoa. Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* Disertasi Universitas Indonesia (UI) dalam tahun 1975. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985.
- Mosse, Julia Cleves. *Half the World, Half s Chance: An Introduction to Gender and Development*, alih bahasakan oleh Harianti Silawati dengan gender dan pembangunan. Yogyakarta: pustaka pelajar , 1996.
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar-Paris EFEO, 2006.
- Rachmah, et al., *Monografi Kebudayaan Makassar di Sulawesi Selatan*. Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, 1984.
- Rahim, Rahman, *Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis*. Ujung Pandang Lephass Unhas, 1985.
- Ridwan, Kafrawi. (ed.), "Hak", *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, Cet . ke-1, Jilid 2.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia, Penggagas dan gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997..
- Sudjana, Nana et. All., *Penelitian dan penilaian pendudukan*. Nadung: Sinar Baru, 1989.
- Welch CE, dan R.I. Meltzer, *Human Rights And Development In Africa*. Albani: State University New York, 1984Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Hukum Islam*, (Cet II; Jakarta: Dian Rakyat), 2010.